

**ANALISA KEBIJAKAN PANGAN
TERHADAP PENDAPATAN USAHA TANI PADI
DI DESA PUCUNG KECAMATAN BALONGPANGGANG GRESIK**

Oleh: Drs. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, M.M⁴.

ABSTRAK

Dalam perspektif usaha tani beras, sebenarnya ada dua kebijakan dasar pemerintah dalam melindungi tingkat pendapatan petani antara lain: subsidi input dan subsidi output. Subsidi input dalam hal ini adalah subsidi harga pupuk, sedangkan subsidi output antara lain: bea masuk (tarif) impor beras dan harga dasar gabah bagi petani. Penelitian ini bertujuan menguji adanya keunggulan komparatif pada usaha tani meskipun terdapat penghapusan proteksi dan menguji perlu tidaknya proteksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan usaha tani padi.

Penelitian ini mengambil sampel 31 petani di Desa Pucung, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan Domestic Resource Cost (DRC). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa usaha tani padi memiliki keunggulan komparatif sebesar 0,703, artinya, pemerintah mampu menghemat devisa sebesar 0,422 rupiah pada setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan. Di samping itu, untuk mempertahankan tingkat pendapatan petani pada tingkat pendapatan yang layak, maka pemerintah harus memberikan proteksi output berupa tarif impor beras minimal sebesar 22 % atau bea masuk sebesar Rp 423,- per kg beras, dan proteksi input berupa subsidi pupuk sebesar 16,86 % untuk pupuk urea, dan 14,7 % untuk pupuk ZA, serta 4% untuk pupuk TSP.

Kata Kunci: *Keunggulan komparatif usaha tani, tingkat proteksi input/output, policy Analysis Matrix (PAM) dan Domestic Resource Cost (DRC)*

⁴ Staf Pengajar FE Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beras merupakan kebutuhan pangan utama penduduk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah masih tetap memprioritaskan kebijakan utama pada ketahanan pangan. Dalam rumusan rapat Kerja Nasional Departemen Jakarta 28 – 29 juli 2000, kebijaksanaan pertanian difokuskan pada dua program, yaitu (1) Sistem ketahanan pangan berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumber daya pangan, kelembagaan, dan budaya lokal; dan (2) Pengembangan sistem agribisnis dengan jalan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan pangan terutama beras sehingga tidak merugikan petani tadi. Dalam membuat kebijaksanaan baik lokal maupun nasional, pemerintah harus mengkaji dulu tingkat kebijakan komparatif dan kompetitif komoditas beras atau padi. Setelah tingkat keunggulan komperatif dan kompetitif diketahui, baru dapat ditentukan kebijakan – kebijakan yang tepat dari pemerintah.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa tingkat keunggulan komparatif usaha tani.
2. Menganalisis tingkat proteksi *input / output* yang relevan untuk melindungi pendapatan usaha tani padi.

TELAAH PUSTAKA

1. Pendapatan Usaha Tani Padi

Secara keseluruhan, tujuan petani kecil berusaha tani adalah menggunakan seefisien mungkin sumberdaya yang dimiliki (lahan, air, tenaga, alat pertanian, modal, kemauan, dan sebagainya) yang akan memaksimumkan

pendapatan bersih usaha tani. Tetapi karena terbatasnya pengetahuan tentang iklim, pasar tempat mereka menjual hasil usaha taninya, serangan hama dan penyakit, perkembangan harga, keragaman teknologi baru, status penggarapan lahan dan iklim politik di mana ia berusaha, maka petani selalu dihadapkan pada masalah ketidakpastian terhadap besarnya pendapatan usaha tani yang diperoleh. Secara ekonomi, faktor yang menyebabkan ketidakpastian dalam mendapatkan tingkat pendapatan yang diinginkan petani dapat dihitung secara kuantitatif. Sedangkan beberapa faktor non ekonomi, dapat diduga lewat selisih pendapatan yang diperoleh petani. Beberapa faktor ekonomi seperti harga pupuk, harga beras, upah tenaga kerja, modal, dan penguasaan tanah dapat dilihat sampai sejauh mana faktor tersebut mempengaruhi pendapatannya. Petani yang memakai pola intensifikasi dan berorientasi pada tingkat produksi dapat dipastikan akan tetap mempertahankan sumberdaya yang dialokasikan untuk usaha taninya.

Dengan kondisi ekonomi yang buruk seperti harga sarana produksi yang naik sementara kenaikan harga faktor produksi itu tidak dibarengi dengan kenaikan harga gabah yang sejajar pula, petani yang berusaha tani secara intensif dapat saja memilih untuk mengalokasikan sumberdayanya secara tetap sekalipun hal itu akan dapat menurunkan pendapatan usaha taninya.

2. Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional adalah menyangkut kemampuan khusus atau keunggulan suatu bangsa untuk memproduksi beberapa jenis barang atau jasa tertentu dengan lebih murah, dibandingkan dengan keadaan di mana sumberdaya dan dananya dicurahkan untuk produksi jenis barang dan jasa lainnya. Oleh karena itu mengapa suatu negara tertentu berhasil untuk memproduksi sejumlah jenis barang dan jasa di

bidang tertentu dengan tingkat biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat biaya di negara lain.

Keunggulan komparatif suatu komoditi dapat dihitung dengan menggunakan analisis *Domestic Resources Cost (DRC)* atau Biaya Sumberdaya Domestik. Analisis Biaya Sumberdaya Domestik ini pada dasarnya menganalisa apakah suatu pertanian mempunyai keunggulan komparatif, atau dengan kata lain analisis Biaya Sumberdaya Domestik dipakai untuk mengukur besarnya satuan devisa yang dihemat / diperoleh apabila komoditas tersebut diproduksi di dalam negeri.

3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan menjadi instrumen penting dalam menentukan tingkat harga beras sekaligus juga mengatur tingkat pendapatan petani. Berkaitan dengan kebijakan *food security* (ketahanan pangan), pemerintah melakukan campur tangan dalam mengkombinasikan faktor-faktor dalam usaha tani padi. Ada dua kebijakan pokok yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu: pengendalian harga beras lewat kontrol permintaan dan penawaran beras, dan subsidi pupuk sebagai insentif dalam usaha tani padi.

Pengendalian harga beras yang dimaksudkan adalah untuk melindungi kepentingan produsen (petani) dengan cara menetapkan harga dasar (*floor price*) dan memberlakukan restriksi terhadap beras luar negeri dengan menetapkan bea masuk / tarif impor beras. Harga dasar ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar harga beras di Indonesia tidak jatuh sehingga merugikan petani.

Sedangkan pengendalian harga beras dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dilakukan dengan menetapkan harga atap (*ceiling price*). Harga atap diberlakukan pemerintah agar harga beras tetap dapat

dijangkau oleh konsumen karena jika harga beras terlalu tinggi akan bisa mengakibatkan inflasi atau dapat pula menyebabkan pendapatan konsumen menjadi menurun. Beras adalah salah satu dari sembilan bahan pokok yang menyumbang tingginya angka inflasi (naiknya harga barang-barang).

Pemerintah Indonesia yang menjadikan ketahanan pangan sebagai pilar pokok kebijakan pertanian memiliki sebuah lembaga yaitu BULOG. Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan kebijakan harga dasar dan harga atap beras. BULOG mengatur jumlah penawaran dan permintaan beras di Indonesia, apabila masa panen raya BULOG melakukan pembelian beras untuk mengurangi jumlah penawaran beras di pasaran dengan tujuan agar harga beras tidak jatuh. Demikian pula ketika terjadi kelangkaan beras (masa paceklik), BULOG melakukan operasi pasar untuk memenuhi permintaan beras di pasaran dengan tujuan agar harga beras tidak melambung tinggi. Selain mengontrol jumlah dan tingkat harga beras melalui BULOG, pemerintah juga dapat mengimpor beras dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri atau sebagai cadangan persediaan beras.

Pada sisi produsen (petani), kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan petani secara langsung adalah pemberlakuan Harga Dasar Gabah (HDG), tarif impor beras, dan subsidi pupuk. Akan tetapi, sejak tahun 1998 akibat desakan internasional pemerintah akhirnya menyepakati *Letter of Intent (Lol)* pada komoditi beras di Indonesia yang mencakup kebijakan tentang penghapusan tarif impor dan pencabutan subsidi pupuk. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah untuk mencabut tarif impor dan subsidi pupuk ini menyebabkan menurunnya pendapatan petani Indonesia.

3.1. Subsidi Pupuk

Subsidi pupuk dimaksudkan sebagai insentif bagi petani agar mereka termotivasi untuk melakukan penanaman padi. Subsidi pupuk berperan penting dalam menekan biaya usaha tani padi. Dalam hal ini, petani memiliki dorongan atau motivasi yang kuat bila harga pupuk relatif rendah. Dengan demikian, subsidi pupuk sangat signifikan artinya bagi program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

3.2. Harga Dasar Gabah

Fungsi Harga Dasar Gabah (HDG) adalah untuk mendukung dan menstabilkan harga gabah yang ada di pasaran. Akan tetapi, harga gabah telah sirna sejak pemerintah membebaskan impor beras pada tahun 1998. Dengan pembebasan impor beras maka pasar gabah nasional terintegrasi dengan pasar gabah dunia, yang berarti keseimbangan harga gabah tidak lagi ditentukan oleh fluktuasi penawaran dan permintaan beras di masyarakat maupun oleh operasi BULOG, tetapi sudah ditentukan oleh harga paritas impor.

Efektifitas pemberlakuan Harga Dasar Gabah (HDG) dapat dilihat dari harga gabah yang berlaku di tingkat petani. Hal ini sekaligus juga dapat menjadi bukti dan analisis terhadap ketetapan ke HDG. Harga gabah yang berlaku di tingkat petani merupakan harga riil yang mempengaruhi pendapatan petani. Oleh karena itu, analisis terhadap harga dasar gabah dapat dilakukan secara deskriptif dari data dan fakta lapangan.

3.3. Tarif Impor

Pembebasan tarif impor beras mengakibatkan pasar beras Indonesia terintegrasi dengan pasar dunia, Dengan demikian, harga gabah di Indonesia ditentukan oleh paritas impornya. Harga gabah paritas impor adalah harga beras

dunia (dikonversi dalam rupiah) plus tarif, ongkos pemasaran, dan biaya pengolahan.

4. Barang *Tradeable* dan *Non Tradeable*

Klasifikasi barang dapat digolongkan menjadi dua yaitu: *tradeable* (yang diperdagangkan) dan *non tradeable*. Suatu barang dikatakan *tradeable* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Dapat diperdagangkan secara internasional (dapat diekspor atau diimpor).
- 2) Merupakan barang substitusi yang dekat dengan barang yang disebut pada poin 1.
- 3) Memenuhi kedua syarat tersebut, walaupun barang tersebut tidak diekspor maupun diimpor, misalnya karena kebijakan pemerintah.

5. Harga Sosial

Menurut Gittinger (1986), harga sosial atau disebut harga bayangan adalah suatu harga yang terdapat dalam perekonomian apabila ada keseimbangan pada kondisi pasar sempurna. Dalam keadaan yang sesungguhnya kondisi pasar persaingan sempurna sukar sekali ditemukan, sehingga apabila dipakai harga pasar pada kondisi pasar yang tidak bersaing maka akan menimbulkan perbedaan. Untuk menilai besar kecilnya nilai harga bayangan perlu diperhatikan adanya hal sebagai berikut:

1. Adanya distorsi yang berkaitan dengan lingkungan atau sistem ekonomi yang berlaku, yang dalam keadaan demikian harga riil belum dapat mencerminkan harga bayangan atau harga keseimbangan yang sebenarnya.
2. Adanya tujuan sosial maupun ekonomi dari maksud dilaksanakannya proyek tersebut juga menentukan besar kecilnya harga bayangan. Oleh karena itu, para analis ekonomi perlu mempertimbangkan hal tersebut.

Dengan demikian, analisa *Policy Analysis Matrix (PAM)* atau disebut dengan Matriks Analisis Kebijakan juga mempertimbangkan konsep keuntungan sosial bersih yaitu penerimaan dan pendapatan serta kerugian bersih dari suatu aktivitas ekonomi dinilai berdasarkan harga sosial / bayangannya, sehingga efek distorsi pasar dan eksternalitas lainnya dapat diminimumkan pengaruhnya.

6. Pengaruh Divergensi

Identitas kedua dari fungsi PAM adalah berkenaan dengan perbedaan nilai individual dan nilai sosial terhadap divergensi. Divergensi atau penyimpangan merupakan pengaruh dari faktor yang menyebabkan penggunaan sumberdaya yang langka menjadi tidak efisien, sehingga tidak menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Divergensi bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penyimpangan produksi seperti penggunaan sumberdaya domestik dan kesempatan dalam perdagangan internasional. Pemerintah biasanya menentukan perubahan kebijakan atau menyokong kelompok tertentu karena mereka menyadari bahwa konsekuensi tanpa perdagangan adalah lebih kecil dibandingkan dengan persepsi pemerintah tentang begitu tidak efisiennya produk yang dihasilkan dilihat dari perubahan distribusi dan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri (Pearson, 1989). Divergensi juga bisa disebabkan oleh kegagalan pasar dalam menghasilkan alokasi efisien dari suatu produk. Kegagalan pasar *input* biasanya lebih menarik daripada kegagalan pasar *output*.

METODA PENELITIAN

1. Sampel

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Pucung Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dengan alasan di desa

tersebut mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi dan desa tersebut juga merupakan salah satu sentra produksi beras khususnya untuk daerah Kabupaten Gresik. Dari survei di lapangan, diketahui jumlah keseluruhan petani di desa penelitian adalah sebanyak 780 orang dan diketahui juga mereka memiliki pola usaha tani padi yang sama, yaitu menggunakan pola intensifikasi. Di samping itu, sistem usaha tani padi di desa penelitian relatif sama mulai dari struktur biaya usaha tani seperti pengadaan saprodi sampai penjualan hasil panen kepada pedagang. Dalam hal ini petani padi di desa penelitian adalah *price taker*. Dari jumlah populasi 780 petani yang menggarap sawah, diambil sampel sebanyak 78 orang responden. Menurut Hamid (1994), bahwa jumlah responden yang diambil minimal sebanyak 10% dari jumlah elemen unit populasi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sampel diambil secara acak sebanyak 10% dari unit populasi yaitu sebanyak 78 petani responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan menyebarkan kuisioner.

2. Metoda Analisis Data

Untuk menguji hipotesis pertama digunakan analisis *Domestic Resources Cost (DRC)* untuk menganalisa apakah suatu komoditi pertanian mempunyai keunggulan komparatif atau dengan kata lain analisis biaya sumberdaya domestik dipakai untuk mengukur berapa besarnya satuan devisa yang dihemat/diperoleh apabila komoditi tersebut diproduksi di dalam negeri. Dalam *Policy Analysis Matrix (PAM)*, nilai DRC atau Biaya Sumberdaya Domestik dapat dicari sebagai berikut: $DRC = G / E - F$.

Untuk mengetahui tingkat proteksi kebijakan yang seharusnya diterapkan dapat dilihat dengan cara membandingkan perhitungan menurut harga pasar dan harga sosial. Perbedaan nilai merupakan akibat dari perbedaan harga finansial / pasar dan

harga sosial. Perbedaan harga pasar dan harga sosial dapat disebabkan karena kebijakan menyimpang, kebijakan efektif atau kelengahan pasar.

Interpretasi dari matriks analisis kebijakan pada pengaruh divergensi dilakukan dengan menghitung transfer *input/output* dan *net transfer*. Transfer *output* didefinisikan sebagai perbedaan antara harga pasar aktual dari komoditi (yaitu A) dan nilai efisiensi dari komoditi (yaitu E). Sedangkan transfer *input* diukur dari faktor *tradeable* dan di definisikan sebagai perbedaan antara total biaya dari *input tradeable* dalam harga

individu (yaitu B) dan total biaya dari *input* yang sama diukur dari harga sosial (yaitu F).

Dalam menghitung tingkat keunggulan komparatif dan tingkat proteksi minimal baik *input* atau *output*, metode *Policy Analysis Matrix (PAM)* diajukan dalam bentuk sebuah tabel yang terdiri dari: (1) Harga Individu, Harga Sosial dan Pengaruh Divergensi pada baris tabel yang membujur secara horizontal; (2) *Revenue* (Penerimaan/Pendapatan), Biaya *Input Tradeable*, Biaya Faktor Domestik, dan Biaya Profit pada kolom vertikal. Tabel di bawah ini akan menjelaskan setiap variabel yang terdapat pada matriks PAM.

	<i>Revenue</i>	Biaya		
		<i>Input Tradeable</i>	Faktor Domestik	Profit
Harga Pasar	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Pengaruh Divergensi dan kebijakan efisien	I	J	K	L

Di mana: $I = A - E$; $J = B - F$ dan $K = C - G$

Keterangan :

A = *revenue* individu (total produksi x harga pasar); B = *input tradeable* x harga pasar

C = faktor domestik x harga pasar; D = profit individual; E = *revenue* sosial (total produksi x harga sosial); F = *input tradeable* x harga pasar; G = faktor domestik x harga sosial; H = profit sosial.

Adapun untuk mengukur kebijakan pemerintah terhadap usaha tani padi, analisis dibagi menjadi 4 yaitu: NPCI, NPCO, EPC, dan PC.

1) NPCO (*Nominal Protection Coefficient of Tradeable Output*)

$$\text{NPCO} = (A / E - 1) \times 100\%$$

2) NPCI (*Nominal Protection Coefficient of Tradeable Input*)

$$\text{NPCI} = (B / F - 1) \times 100\%$$

3) *Effective Protection Coefficient* (EPC)

$$\text{EPC} = \frac{A - A}{E - F} - 1$$

4) *Profitability Coefficient* (PC)

$$\text{PC} = D / H$$

2.1. Penentuan Harga Sosial / Bayangan

Untuk menentukan harga sosial / bayangan dari tiap variabel dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Harga Sosial Beras

$$\text{HSB} = \frac{\text{HPIB} + \text{HPEB}}{2}$$

2

Keterangan:

HSB = Harga Sosial Beras; HPIB = Harga Paritas Impor Beras; HPEB = Harga Paritas Ekspor Beras

2. Harga Sosial Pupuk Urea

Sejak tahun 1997, pupuk urea sampai saat ini masih diekspor sehingga harga sosial pupuk urea adalah:

$$HSU = (H \text{ f.o.b.} - \text{BAM}) \times \text{SER} + \text{BAP} + \text{BAG} + \text{BG} + \text{BAU}$$

Keterangan:

HSU = Harga Sosial Urea; Hfob = harga f.o.b. beras di Bangkok; BAM = Biaya Asuransi dan Muatan; BAP = Biaya Angkutan sampai ke Penyalur (Rp/ton); BAG = Biaya Angkutan sampai ke Grosir (Rp/ton)

BG = Biaya Gudang

BAU = Biaya Angkutan sampai Usaha tani (Rp/ton)

3. Harga Sosial TSP

Karena TSP adalah komoditi impor dan sejak tahun 1992 Indonesia mengimpor TSP dari Bangladesh maka:

$$\text{HSTsp} = (\text{Hcif} - \text{BAM}) \times \text{SER} + \text{BAP} + \text{BAG} + \text{BG} + \text{BAU}$$

HSTsp = Harga Sosial pupuk TSP

4. Harga Sosial ZA

Sejak tahun 1992, Indonesia mengimpor ZA dari Jepang dan mengekspor ZA ke Vietnam, karena itu:

$$\text{HSZA} = \frac{\text{HPI ZA} + \text{HPE ZA}}{2}$$

Di mana: HSZA adalah Harga Sosial pupuk ZA.

5. Harga Sosial Pestisida

Pemakaian pestisida oleh petani untuk budidaya tanaman padi relatif sedikit yaitu rata-rata 1 liter per hektar. Maka harga pasar yang dikenakan pada petani dapat digunakan sebagai harga sosial.

6. Harga Sosial Tanah

Nilai tanah di daerah penelitian cukup ekonomis sehingga persaingan harga tanah sangat kompetitif. Oleh karena itu, harga sosial tanah dapat ditentukan sebesar harga sewa tanah.

7. Harga Sosial Tenaga Kerja

Tidak ada sistem sambatan / bawon dan permintaan tenaga kerja adalah sama dengan penawaran tenaga kerja sehingga upah riil dipakai sebagai harga sosial.

2.2. Penentuan Profit Individu, Profit Sosial, dan Faktor Domestik

1. Profit Individual (D); yaitu $D = A - B - C$

Keterangan:

A = *revenue* individual; B = biaya *input tradeable* individual; C = biaya faktor domestik usaha tani individual

2. Profit Sosial (H), yaitu: $H = E - F - G$

Keterangan:

E = *revenue* usaha tani yang dihitung dengan harga sosial; F = *input tradeable* yang dihitung dengan harga sosial; G = faktor domestik yang dihitung dengan harga sosial

3. Faktor Domestik

$$C_p = U_{tk} + S_t$$

Keterangan:

U_{tk} = Upah tenaga kerja; S_t = sewa tanah / lahan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Harga Sosial

Analisa Kebijakan Pangan (Pratiwi Dwi Karjati)

Harga sosial benih adalah sama dengan harga pasar/individunya yaitu sebesar Rp. 2800,-/kg. Harga sosial pestisida juga dihitung sebesar Rp 40.000,-. Harga pasar pupuk urea yang diterima petani di daerah penelitian adalah sebesar Rp 1150,-. Sementara harga sosial pupuk urea adalah sebesar Rp 984,39,- per kilogramnya. Di bawah ini merupakan analisis harga sosial pupuk urea.

Tabel 1. Analisis Harga Sosial Pupuk Urea

Variabel	Harga per kg	Total
f.o.b.	\$ 0,130	
Asuransi dan Muatan	\$ 0,035	
JUMLAH (FOB-asuransi dan muatan)		\$ 0,095
S.E.R.	Rp 10.362,-	
Harga Sosial		Rp 984,39,-

Harga pasar pupuk ZA yang diterima petani di daerah penelitian adalah sebesar Rp 960,-. Sementara harga sosial pupuk urea adalah sebesar Rp 837,- per kilogramnya. Di bawah ini merupakan analisis harga sosial pupuk ZA.

Tabel 2. Analisis Harga Sosial Pupuk ZA

Variabel	Harga per kg	Total
c.i.f.	\$ 0,077	
Asuransi dan Muatan	\$ 0,00365	
JUMLAH (c.i.f. + asuransi dan muatan)		\$ 0,081
S.E.R.	Rp 10.362,-	
Harga Sosial		Rp 837,-

Sementara harga pasar yang dikenakan kepada petani (harga riil TSP di tingkat petani) adalah sebesar Rp 1750,-. Perbedaan antara harga pasar dengan harga sosial pupuk urea ini menandakan bahwa terdapat penyimpangan pasar dalam perdagangan pupuk ZA. Di bawah ini merupakan analisis harga sosial pupuk TSP.

Tabel 3. Analisis Harga Sosial Pupuk TSP

Variabel	Harga per kg	Total
c.i.f.	\$ 0,149	
Asuransi dan Muatan	\$ 0,01355	
JUMLAH (c.i.f. + asuransi dan muatan)		\$ 0,163
S.E.R.	Rp 10.362,-	
Harga Sosial		Rp 1.684,-

Harga individu maupun harga sosial satu orang tenaga kerja upahan adalah sebesar Rp 10.000,- per hari kerja. Tidak ada perbedaan upah antara tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Sewa tanah untuk usaha tani padi per hektar per musim tanam di daerah penelitian adalah sebesar Rp 2.600.00,-. Dengan demikian, nilai sewa tanah tersebut di samping dapat dipakai sebagai biaya individu/pasar juga dapat dipakai sebagai biaya sosialnya. Biaya sewa traktor per hektarnya untuk sekali pengolahan sebesar Rp 552.300,-. Sedang biaya tenaga kerja operator traktor adalah Rp 100.000 per hektar. Jadi, biaya traktor secara keseluruhan adalah Rp 652.300,-.

2. Analisis Anggaran Usaha Tani Padi

Pada tabel di bawah ini akan dikemukakan analisis tentang anggaran usaha tani padi berdasarkan harga riil/pasar.

Tabel 4. Analisis Anggaran Usaha Tani Pada Harga Pasar/Individu (per hektar)

<i>Input</i>	Variabel	Kuantitas (per ha.)	Harga Pasar (satuan)	Total Harga
<i>Tradeable</i>	Benih	48 kg	Rp 1.750,-	Rp 84.000,-
	Pestisida	1 liter	Rp 40.000,-	Rp 40.000,-
	Pupuk Urea	216 kg	Rp 1.150,-	Rp 248.400,-
	Pupuk ZA	190 kg	Rp 960,-	Rp 182.400,-
	Pupuk TSP	85 kg	Rp 1.750,-	Rp 148.750,-
Domestik	Sewa Lahan	1 ha	Rp 2.594.345,-	Rp 2.594.345,-
	Sewa Traktor	1 ha	Rp 652.300,-	Rp 652.300,-
	Tenaga Kerja:			
	- penyiangan			Rp 206.400,-
	- penanaman			Rp 365.995,-
	- pemeliharaan			Rp 21.622,-
- pemanenan			Rp 212.060,-	
TOTAL BIAYA				Rp 4.756.272,-

Berdasarkan hasil tersebut anggaran biaya yang dikeluarkan oleh petani jika biaya *tradeable* dan domestiknya berdasarkan harga pasar adalah Rp 4.756.272,-. Berdasarkan hasil di tabel 5 anggaran biaya yang dikeluarkan oleh petani jika biaya *tradeable* dan domestiknya diukur berdasarkan harga sosial adalah Rp 4.691.436,-

Tabel 5. Analisis Anggaran Usaha Tani Pada Harga Sosial (per hektar)

<i>Input</i>	Variabel	Kuantitas (per ha.)	Harga Sosial (satuan)	Total Harga
<i>Tradeable</i>	Benih	48 kg	Rp 1.750,-	Rp 84.000,-
	Pestisida	1 liter	Rp 40.000,-	Rp 40.000,-
	Pupuk Urea	216 kg	Rp 984,-	Rp 212.544,-
	Pupuk ZA	190 kg	Rp 837,-	Rp 159.030,-
	Pupuk TSP	85 kg	Rp 1.684,-	Rp 143.140,-
<i>Domestik</i>	Sewa Lahan	1 ha	Rp 2.594.345,-	Rp 2.594.345,-
	Sewa Traktor	1 ha	Rp 652.300,-	Rp 652.300,-
	Tenaga Kerja:			
	- penyiangan			Rp 206.400,-
	- penanaman			Rp 365.995,-
	- pemeliharaan			Rp 21.622,-
- pemanenan			Rp 212.060,-	
TOTAL BIAYA				Rp 4.691.436,-

Tabel 6. Perbandingan *Input* Usaha Tani Padi Pada Harga Pasar dan Harga Sosial

<i>Input</i>	Harga Pasar	Harga Sosial
<i>Tradeable</i>	Rp 703.550,-	Rp 638.714,-
<i>Domestik</i>	Rp 4.052.722,-	Rp 4.052.722,-
Total	Rp 4.756.272,-	Rp 4.691.436,-

3. Analisis Pendapatan Dan Keuntungan Usaha Tani Padi

Analisis pendapatan dan keuntungan usaha tani padi akan ditinjau dari harga riil/pasar dan harga sosial/dunia.

Analisa Kebijakan Pangan (Pratiwi Dwi Karjati)

Tabel 7. Analisis Harga Sosial Beras

Variabel	Harga per kg	Total
c.i.f.	\$ 0,259	
Penyesuaian Muatan (PM)	\$ 0,03887	
Biaya Asuransi dan Muatan (BAM)	\$ 0,04685	
JUMLAH (c.i.f. – PM + BAM)		\$ 0,267
S.E.R.	Rp 10.362,-	
Paritas impor (c.i.f. – PM+BAM) x S.E.R.		Rp 2.768,-
f.o.b.	\$ 0,21234	
Penyesuaian Muatan (PM)	\$ 0,03185	
Biaya Asuransi dan Muatan (BAM)	\$ 0,04685	
JUMLAH (f.o.b. – PM – BAM)		\$ 0,13364
S.E.R.	Rp 10.362,-	
Paritas Ekspor (f.o.b. – PM – BAM) x SER		Rp 1.385
Harga Sosial		Rp 2.077,-

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa harga beras dunia adalah Rp 2077,- per kilogram. Dengan demikian, penerimaan usaha tani jika dihitung berdasarkan harga sosial adalah sebesar Rp 6.280.848,-. Jumlah penerimaan ini diperoleh dari penghitungan antara harga sosial beras yaitu Rp 2.077,- dikalikan *output* beras yang telah dihasilkan petani di daerah penelitian yaitu sebesar 3024 kg.

Tabel 8. Perbandingan *Output* dan Penerimaan Usaha Tani Padi Pada Harga Pasar dan Harga Sosial

<i>Output/</i> Gabah	Hasil Konversi	Harga Jual Per Kg		<i>Revenue</i> (Penerimaan)	
		Harga Pasar	Harga Sosial	Harga Pasar	Harga Sosial
6000 kg	3024 kg	Rp 2500,-	Rp 2077,-	Rp6.560.000,-	Rp6.280.848,-

Dari analisis tentang anggaran dan pendapatan usaha tani padi, maka dapat diketahui pula jumlah keuntungan yang diperoleh usaha tani padi, baik jika dihitung berdasarkan harga pasar maupun harga sosial. Tabel 9 di bawah ini mengemukakan analisis perbandingan keuntungan usaha tani padi berdasarkan harga sosial dan pasar.

Tabel 9. Perbandingan Profit Usaha Tani Berdasarkan Harga Pasar dan Harga Sosial

Variabel	Harga Pasar	Harga Sosial
Biaya	Rp 4.756.272,00	Rp 4.691.436,00
Penerimaan	Rp 7.560.000,00	Rp 6.280.848,00
Profit	Rp 2.803.728,00	Rp 1.589.412,00

Dari tabel perbandingan di atas dapat diketahui bahwa profit yang diperoleh usaha tani padi berdasarkan harga pasar adalah sebesar Rp 2.803.728,-, sementara profit usaha tani padi berdasarkan harga sosial adalah sebesar Rp 1.589.412,-.

4. Analisis Matriks Kebijakan Usaha Tani Padi

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat beberapa pembahasan yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian ini. Namun seperti yang telah dijelaskan dalam analisis biaya usaha tani, angka-angka pengukuran yang diperoleh serta pembahasan pada setiap analisisnya adalah berdasarkan asumsi bahwa biaya pengolahan hasil panen tidak ada/nol. Sehingga agar lebih mendekati fakta di lapangan, analisis dilakukan menggunakan faktor konversi untuk menghitung penerimaan.

4.1. Domestic Resources Cost (DRC)

Dari analisis sumberdaya domestik, apabila nilai $DRC > 1$ berarti usaha tani padi tidak memiliki keunggulan komparatif atau dengan kata lain usaha tani padi tidak efisien dan hanya akan menyebabkan pemborosan devisa. Analisis keunggulan komparatif berkaitan dengan biaya yang diluankan (*opportunity cost*) dari sumberdaya domestik. Artinya, apabila $DRC > 1$ maka sumberdaya domestik seperti tanah dan tenaga kerja lebih baik digunakan untuk komoditas yang memiliki efisiensi dan mampu bersaing di pasar internasional. Apabila $DRC = 1$ maka usaha tani tersebut bersifat netral atau dengan kata lain nilai *opportunity cost*nya sama dengan nol. Demikian pula bila $DRC < 1$, maka komoditas atau usaha tani tersebut memiliki keunggulan komparatif dan mampu menghemat devisa untuk setiap satu unit biayanya.

Analisis DRC merupakan bagian dari analisis PAM (*Policy Analysis Matriks*). Karena itu, di bawah ini akan dikemukakan terlebih dahulu tentang tabel analisis PAM terhadap usaha tani padi.

Tabel 10. Matriks Analisis Kebijakan Usaha Tani Padi

Variabel	Penerimaan	Biaya		Profit
		Tradeable	Domestik	
Harga Pasar	Rp 7.560.000,-	Rp 703.550,-	Rp 4.052.722,-	Rp 2.803.728,-
Harga Sosial	Rp 6.280.848,-	Rp 638.714,-	Rp 4.052.722,-	Rp 1.589.412,-
Divergensi	Rp 1.279.152,-	Rp 64.836,-	-	Rp 1.214.316,-

Analisis DRC diukur dengan menghitung rasio antara biaya sosial faktor domestik terhadap selisih antara harga sosial penerimaan (*revenue*) usaha tani dan biaya sosial faktor *tradeable*.

$$DRC = \frac{HSFD}{HSR-HST}$$

$$DRC = \frac{4.052.722}{6.280.848 - 638.714} = 0,718$$

Dari analisis keunggulan komparatif usaha tani padi di daerah penelitian diperoleh nilai DRC sebesar 0,718. Hal ini berarti usaha tani padi di daerah penelitian memiliki keunggulan komparatif karena nilai DRC nya lebih kecil dari 1 ($DRC < 1$).

Usaha tani padi di daerah penelitian ternyata memiliki daya saing produk setelah mengalami modernisasi pertanian seperti intensifikasi dan ekstensifikasi. Nilai DRC sebesar 0,718 memperlihatkan bahwa setiap pemakaian biaya sumberdaya domestik sebesar 0,718 mampu menghasilkan devisa sebesar 1 (satu) rupiah atau setiap satu unit biaya domestik yang

dikeluarkan dalam usaha tani padi mampu menghemat devisa sebesar 0,282 rupiah. Angka mengindikasikan bahwa kebijakan ketahanan pangan dapat diteruskan dan ditingkatkan dengan cara meningkatkan produktivitas usaha tani padi untuk memaksimalkan *output* usaha tani berupa beras sehingga dapat memperkecil koefisien DRC yang berarti dapat menghemat devisa lebih besar atau memiliki *opportunity cost* yang lebih besar.

Usaha tani padi memiliki keunggulan komparatif karena biaya faktor domestik usaha tani padi memiliki pengaruh yang besar dalam usaha tani padi. Hal ini bisa dilihat pada struktur biaya faktor domestik berupa prosentase faktor domestik sebesar 86% dari total biaya. Artinya, sejumlah 86% sumberdaya untuk usaha tani padi dapat disediakan oleh wilayah setempat secara lebih murah. Dari total faktor domestik tersebut, sewa tanah menyumbang 65,5%, traktor sebesar 15,1%, dan tenaga kerja sebesar 19,4% dari total biaya faktor domestik.

4.2. Nominal Protection Coefficient of Tradeable Outputs (NPCO)

Nominal Protection Coefficient of Tradeable Outputs (NPCO) digunakan untuk menilai tingkat proteksi yang diterapkan pemerintah dan mengetahui transfer *output* beras yang terjadi pada usaha tani padi. Jika $NPCO > 1$, mengindikasikan terjadinya transfer *output* dari konsumen kepada produsen, karena konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya mereka terima. Jika $NPCO = 1$, maka tidak terjadi transfer *output*; dan sebaliknya jika $NPCO < 1$ maka terjadi transfer *output* dari produsen ke konsumen karena produsen harus kehilangan sebagian dari pendapatan yang seharusnya diperoleh untuk menyokong konsumen. Di bawah ini merupakan tabel yang berisi tentang transfer *output* usaha tani padi.

Tabel 11. Transfer *Output* dan Penerimaan Usaha Tani

Variabel	Penerimaan	
	Per 6 ton	Per 1 Kg
Harga Pasar	Rp 7.650.000,-	Rp 1.275,-
Harga Sosial	Rp 6.280.848,-	Rp 1.046,8,-
Pengaruh Divergensi	Rp 1.279.152,-	Rp 213,2,-

Dari hasil analisis diperoleh nilai NPCO sebesar 1,22 (Rp1.275/Rp 1.046,8). Dengan demikian, NPCO adalah lebih besar dari 1 (NPCO>1). Artinya terdapat transfer *output* dari konsumen ke petani sebesar Rp 213,2 (Rp1275 – Rp 1.046,8) yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang senilai dengan tarif impor sebesar 22% dari harga beras dunia. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan *output* usaha tani padi meliputi penetapan harga dasar gabah dan pemberlakuan tarif impor.

Selanjutnya, tingkat harga *output* tersebut di atas dapat mempertahankan tingkat keuntungan petani pada Rp 2.803.728,- per musim tanam/3 bulan (lihat tabel 18 kolom profit harga pasar). Artinya, bila harga padi berada pada tingkat rp 2500,- atau harga dasar gabah kering giling berada pada tingkat Rp 1580,- per kilogram, maka harga tersebut masih dapat merangsang petani untuk memproduksi padi. Namun bila harga dasar gabah kering giling atau harga beras turun di bawah tingkat harga tersebut, maka petani tidak akan memiliki motivasi yang cukup untuk usaha tani padi. Hal ini dikarenakan perubahan produktivitas dan harga *output* akan mempengaruhi keseluruhan sistem usaha tani padi dibandingkan dengan perubahan salah satu *input* yang hanya mempengaruhi variabel biaya *input* tersebut.

Artinya, bila pemerintah tetap ingin mempertahankan program ketahanan pangan pemerintah harus meningkatkan produktivitas usaha tani padi dan memelihara tingkat harga *output* pada harga yang mampu merangsang petani memproduksi padi. Dalam beberapa hal, tingkat harga psikologis beras/gabah kering giling yang dapat merangsang usaha tani padi dapat diukur berdasarkan harga pupuk urea. Dengan demikian, untuk mempertahankan tingkat pendapatan petani pada saat penelitian ini dilakukan, pemerintah harus mengenakan tarif impor beras sebesar 22% atau bea masuk beras impor sebesar Rp 228,4,- per kilogram.

Di samping itu, untuk memelihara kestabilan harga di tingkat produsen maupun konsumen beras maka pemerintah seyogyanya melakukan pengendalian stok beras dengan kebijakan *keran buk-tutup*. Artinya, apabila masa paceklik tiba, pemerintah dapat membuka jalur impor lebih longgar untuk memenuhi permintaan beras dalam negeri. Namun bila musim panen tiba, maka pemerintah dapat menutup jalur impor atau membatasi masuknya beras impor agar harga beras dalam negeri tidak jatuh.

Selain harga dasar beras/gabah, pemerintah juga harus mengenakan bea masuk terhadap beras impor minimal sebesar (Rp 2.500 – Rp 2.077) yaitu sebesar Rp 423,-. Bila menilik kebijakan pemerintah di dalam program ketahanan pangan, sejak 1 Januari 200 pemerintah telah menetapkan bea masuk impor beras sebesar 30% *ad valerom* harga rata-rata beras dunia atau sekitar Rp 430,- (Kompas, 19 Februari 2002 dan 8 Mei 2003). Artinya, pemerintah telah melakukan penetapan bea masuk atau pajak impor beras yang sesuai untuk meningkatkan pendapatan petani. Hanya saja, pelaksanaan kebijakan bea masuk atau pajak impor ini juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap stok beras. Hal ini dikarenakan

kenaikan harga beras yang lebih tinggi dari harga dunia mendorong terjadinya penyelundupan beras impor atau sering disebut sebagai beras *spanyol (separo nyolong)*.

4.3. Nominal Protection Coefficient of *Tradeable Inputs* (NPCI)

Nominal Protection Coefficient of *Tradeable Inputs* (NPCI) adalah suatu analisis yang mencari sumber penyimpangan dalam *input tradeable* terhadap harga dunia. Sama halnya dengan NPCO, harga dunia bertindak sebagai penilaian sosial dari semua *input tradeable*. Koefisien NPCI adalah kebalikan dari koefisien NPCO karena kebijakan proteksi untuk *input tradeable* memiliki tujuan yang berbeda dengan kebijakan *output*. Bila kebijakan *output* menaikkan atau menurunkan produk per tonnya untuk keseluruhan sistem, kebijakan inout dirancang untuk sistem usaha tani yang diarahkan pada teknologi suatu *input* yang mendapat subsidi secara intensif.

$NPCI > 1$ menunjukkan transfer negatif sebab biaya *input* bertambah akibat adanya kebijakan atau kegagalan pasar. Hal ini mengindikasikan telah terjadi transfer *input* dari petani kepada pemerintah atau produsen *input*, karena harga *input* individu yang harus dibayar oleh petani lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar (harga dunia). Demikian pula bila $NPCI < 1$, berarti terjadi transfer *input* dari pemerintah kepada petani, karena harga yang seharusnya ditanggung oleh petani (harga dunia) dibebankan ke pemberi subsidi (pemerintah). Bila $NPCI = 0$, maka tidak ada transfer *input tradeable*.

Tabel 12. Transfer *Input* Usaha Tani Padi

Variabel	Biaya <i>Input Tradeable</i> (Per Kg)				
	Urea	ZA	TSP	Lain-lain	Total
Harga Pasar	Rp 1.150,-	Rp 960,-	Rp 1.750,-	Rp 1.830,-	Rp 5.690,-
Harga Sosial	Rp 984,-	Rp 837,-	Rp 1.684,-	Rp 1.830,-	Rp 5.335,-
Pengaruh Divergensi	Rp 166,-	Rp 123,-	Rp 66,-	-	Rp 355,-

Hasil analisis NPCI memperlihatkan bahwa semua *input tradeable* — kecuali benih dan pestisida— memiliki nilai lebih dari 1 (>1) yang disebabkan adanya penyimpangan pasar domestik terhadap pasar dunia. Nilai NPCI untuk masing-masing *input tradeable* adalah 1,168 (urea), 1,147 (ZA) dan 1,04 (TSP). Hal ini mengakibatkan petani membayar harga lebih tinggi sebesar 16,86% untuk pupuk urea, 14,7% untuk pupuk ZA, dan 4% untuk pupuk TSP dari harga dunia.

Timbulnya harga individu yang lebih tinggi daripada harga dunia ini diakibatkan oleh pengurangan subsidi pupuk ataupun tarif ekspor oleh pemerintah sampai nol persen. Hal ini mengakibatkan produsen pupuk dalam negeri terutama pupuk urea lebih menyukai permintaan internasional/ekspor daripada permintaan dalam negeri. Sebab, pemerintah tidak melakukan pembelian pupuk lagi. Kebijakan pemerintah melalui perampangan tataniaga pupuk ternyata belum dapat menjawab tingginya harga pupuk. Faktor-faktor seperti perilaku pelaku pasar menyebabkan tidak optimalnya kebijakan pemerintah. Artinya, penyimpangan pasar *input tradeable* seperti pupuk lebih disebabkan oleh faktor kegagalan pasar dan distorsi kebijakan pemerintah.

Peran kebijakan pemerintah dalam menentukan harga pupuk atau menekan biaya *input* seperti pemupukan sebenarnya dapat mendorong pemakaian sistem usaha tani padi yang lebih modern dan optimal. Setiap pemakaian *input* dapat mempengaruhi produktivitas dan harga hasil panen. Perbedaan harga *input tradeable* memperlihatkan petani padi masih memerlukan kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga pupuk berupa subsidi pupuk masing-masing sebesar 16,86% (Rp 166,-/kg) untuk pupuk

urea, 14,7% (Rp 123,-/kg) untuk pupuk ZA, dan 4% (Rp 66,-/kg) untuk pupuk TSP. Subsidi pupuk akan merangsang pemanfaatan intensifikasi secara lebih optimal.

Kenaikan harga pupuk biasanya terjadi menjelang masa tanam. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi untuk seluruh kebutuhan pupuk berturut-turut sebesar Rp166,-/kg untuk urea, Rp123,-/kg untuk ZA, dan Rp 66,-/kg untuk TSP dikalikan jumlah total permintaan untuk masing-masing pupuk tersebut. namun untuk mengetahui besarnya dan yang dibutuhkan untuk subsidi pupuk secara lebih tepat, maka harus dihitung dulu besarnya permintaan pupuk di dalam negeri. Selain kegagalan pasar dan distorsi kebijakan, kenaikan harga pupuk juga dikarenakan pemakaian pupuk yang terlalu berlebihan dalam rangka melipatgandakan produktivitas usaha tani padinya. Oleh sebab itu, untuk menghindari pemborosan dan subsidi maka pemerintah juga harus memberikan penyuluhan tentang pemakaian pupuk yang tepat kepada petani padi. Bila pemakaian pupuk urea sudah mencapai 250 kilogram per hektar, maka pemakaian pupuk tersebut sudah melebihi batas dan tidak akan dapat meningkatkan produktivitas padi.

4.4. Effective Protection Coefficient (EPC)

EPC adalah suatu indikator perangsang bersih atau pengaruh disinsentif untuk semua kebijakan komoditas yang mempengaruhi harga *output* dan *input tradeable*. EPC lebih dari satu ($EPC > 1$) berarti laba individu lebih tinggi dibanding laba tanpa kebijakan komoditas; transfer dari kedua kebijakan dan *input tradeable* adalah positif. EPC kurang dari satu ($EPC < 1$) menandakan hasil sebaliknya; efek kebijakan yang mengubah harga dalam pasar produk adalah mengurangi laba individu dan kombinasi transfer efek kebijakan adalah negatif.

Tabel 13. Koefisien Proteksi Efektif Untuk Sistem Usaha Tani Padi

Variabel	Jumlah	
	Penerimaan	Biaya <i>Input Tradeable</i>
Harga Individu	Rp 7.560.000,-	Rp 703.550,-
Harga Sosial	Rp 6.280.848,-	Rp 638.714,-
Pengaruh Divergensi	Rp 1.279.152,-	Rp 64.836,-

Pengukuran EPC usaha tani padi mempunyai nilai sebesar $(7.560.000-703.550)/(6.280.848-638.714) = 1,215$. Dengan demikian, EPC usaha tani padi adalah lebih dari 1 ($EPC > 1$). Hasil ini menunjukkan bahwa keragaan kebijakan terhadap komoditas beras masih memiliki cukup rangsangan bagi petani dalam usaha tani padi. Artinya, efek dari kebijakan pemerintah dalam *output* usaha tani dan *input tradeable* tidak mengakibatkan berkurangnya rangsangan bagi petani padi di daerah penelitian untuk mengusahakan tanaman padi. Hal ini dikarenakan nilai lebih dari kebijakan *output* lebih besar dibandingkan nilai negatif dari kebijakan *input tradeable* seperti pupuk. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat laba terhadap *input tradeable* pada harga individu terhadap harga sosial dapat mengukur tingkat rangsangan produksi suatu komoditas. Namun EPC tidak dapat mengukur kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pemakaian suatu *input* atau teknologi dalam peningkatan produktivitas seperti yang dapat ditemukan

dalam analisis NPCI atau ambang harga panen yang dapat mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas.

4.5. Profitability Coefficient (PC)

Profitability Coefficient (PC) menunjukkan efek rangsangan kebijakan terhadap peningkatan pendapatan bersih petani. Jika $PC > 1$, maka kebijakan telah mampu meningkatkan pendapatan petani. Jika $PC = 1$ maka seperangkat kebijakan ternyata tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani karena keuntungan individu yang diterima petani sama dengan keuntungan sosialnya. Sedangkan jika $PC < 1$ berarti kebijakan-kebijakan pemerintah justru menurunkan pendapatan petani.

Koefisien profitabilitas merupakan analisis yang dapat melengkapi analisis EPC. Bila EPC hanya mengukur nilai tambah kebijakan *output-input tradeable* dari harga individu terhadap harga sosial, koefisien probabilitas mengukur kenaikan atau pengurangan laba/profit individu terhadap laba sosial yang diakibatkan oleh transfer kebijakan. Dengan demikian, koefisien profitabilitas memasukkan unsur transfer faktor domestik pada analisisnya.

Tabel 14. Transfer Bersih dan Koefisien Profitabilitas

	<i>Revenue</i>	Biaya		
		<i>Input Tradeable</i>	Faktor Domestik	Profit
Harga Individu	7.560.000	703.550	4.756.272	2.803.728
Harga Sosial	6.280.848	638.714	4.756.272	1.589.412
Pengaruh Divergensi	1.279.152	64.836	-	1.214.316

Transfer bersih adalah penjumlahan dari semua penyimpangan yang menyebabkan laba individu berbeda dengan laba sosial. laba sosial sebesar Rp 1.589.412,-. Artinya, sistem usaha tani padi sudah dapat beropersi secara menguntungkan tanpa transfer kebijakan. Namun dengan adanya transfer kebijakan, sebesar Rp 1.214.316,- telah mengangkat laba yang diterima oleh petani dari Rp 1.589.412,- jadi Rp 2.803.728,-.

Rasio koefisien profitabilitas (PC) dalam usaha tani padi di desa penelitian memiliki nilai sebesar $Rp\ 2.803.728,- / Rp\ 1.589.412,- = 1,73$. Koefisien profitabilitas sebesar 1,73 tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan 1,73 kali lebih besar dari pendapatan yang seharusnya diterima petani pada harga sosial sebesar Rp 1.214.316,-.

Pendapatan usaha tani padi di desa penelitian sebesar Rp 1.589.412,- adalah positif yang berarti apabila pasar domestik terintegrasi dengan pasar internasional secara sempurna, petani masih mampu mendapatkan keuntungan. Namun nilai ini masih rendah bila dipakai sebagai ukuran standar kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus dapat meningkatkan efisiensi usaha tani padi yang berarti menekan biaya *input* dan memaksimalkan keuntungan lewat harga *output*.

SIMPULAN

Usaha tani memiliki keunggulan komparatif, yang berarti bahwa usaha tani di desa penelitian telah mampu menunjang program ketahanan pangan pemerintah. Pemerintah harus memberikan subsidi *output*, baik berupa tarif impor, bea masuk maupun harga dasar komoditi usaha tani padi. Pemerintah juga harus berusaha supaya tidak terjadi penurunan harga beras..

Paket kebijakan pemerintah dalam program ketahanan pangan masih dapat meningkatkan pendapatan petani 1,52 kali lebih besar dari pendapatan yang seharusnya diterima oleh petani pada harga sosial. Hal ini berarti Pemerintah telah dapat mendukung sistem usaha tani padi.

Kebijakan fiskal pemerintah untuk melindungi kepentingan petani padi seharusnya masih tetap diperlukan dan diarahkan pada pengadaan subsidi *input* dan *output*. Subsidi *input* meliputi subsidi harga pupuk dan saprodi, sedangkan subsidi *output* meliputi penetapan harga dasar dan penerapan pembatasan perdagangan internasional seperti bea masuk dan tarif impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanil. 1994 *Pangan Dalam Orde Baru*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Buku I Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Gittinger, Price J. 1986. *Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*. Jakarta: UI Press
- Pearson, S.R. & Monke, E.A. 1989. *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. London: Cornell University Press.
- Soekartawi, Dkk. 1985. *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekirno, Sadono. 1985. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tambunan, Tulus. 2001 *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. Jakarta: LP3ES.